



## Budaya Politik Masyarakat dalam Mendukung Implementasi Program Bantuan Sosial di Kelurahan Rantau Indah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Fitria Alha<sup>1\*</sup>, Nasuhaidi<sup>2</sup>, Aditya Romadhon<sup>3</sup>, Dimas Subekti<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

Email : [fitri563197@gmail.com](mailto:fitri563197@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [nasuhaidi@unja.ac.id](mailto:nasuhaidi@unja.ac.id)<sup>2</sup>, [adityaromadhon@unja.ac.id](mailto:adityaromadhon@unja.ac.id)<sup>3</sup>, [dimassubekti05@unja.ac.id](mailto:dimassubekti05@unja.ac.id)<sup>4</sup>

\*Penulis Korespondensi: [fitri563197@gmail.com](mailto:fitri563197@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to analyze the political culture of the community in supporting the implementation of social assistance programs in Rantau Indah Village, Tanjung Jabung Timur Regency. This research employed a descriptive qualitative approach to understand community political culture through cognitive, affective, and evaluative orientations toward social assistance programs. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving village officials, RT/RW leaders, and social assistance beneficiaries. The findings indicate that community political culture plays an important role in supporting the implementation of social assistance programs. In the cognitive aspect, most people understand the existence and objectives of social assistance, although some still have limited understanding of beneficiary criteria. In the affective aspect, the community shows trust in village officials despite perceptions of inequality in aid distribution. Meanwhile, the evaluative aspect reflects community participation in supervision and feedback. Overall, community political culture tends to be participatory in supporting social assistance implementation. The study also reveals that transparent communication, active community involvement, and accountability of village authorities contribute significantly to strengthening public trust and improving the effectiveness of program implementation. Community participation in monitoring and evaluating the distribution process helps minimize potential conflicts and encourages greater transparency. These findings suggest that strengthening political awareness, enhancing public access to information, and promoting participatory governance are essential to ensure that social assistance programs are implemented fairly, effectively, and sustainably while improving community welfare and reinforcing good local governance practices.*

**Keywords:** *Accountability; Community Participation; Participatory Governance; Political Culture; Social Assistance.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis budaya politik masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program bantuan sosial di Desa Rantau Indah, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami budaya politik masyarakat melalui orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif terhadap program bantuan sosial. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan aparat desa, ketua RT/RW, serta penerima bantuan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya politik masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program bantuan sosial. Pada aspek kognitif, sebagian besar masyarakat memahami keberadaan dan tujuan program bantuan sosial, meskipun masih terdapat sebagian masyarakat yang memiliki pemahaman terbatas mengenai kriteria penerima bantuan. Pada aspek afektif, masyarakat menunjukkan kepercayaan kepada aparat desa meskipun masih terdapat persepsi mengenai ketidakmerataan dalam pendistribusian bantuan. Sementara itu, aspek evaluatif tercermin dari partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan program. Secara keseluruhan, budaya politik masyarakat cenderung bersifat partisipatif dalam mendukung implementasi program bantuan sosial. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa komunikasi yang transparan, keterlibatan aktif masyarakat, serta akuntabilitas aparat desa memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan mengevaluasi proses penyaluran bantuan turut membantu meminimalkan potensi konflik serta mendorong terciptanya transparansi yang lebih baik. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan kesadaran politik masyarakat, peningkatan akses terhadap informasi publik, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang partisipatif merupakan faktor penting untuk memastikan program bantuan sosial dilaksanakan secara adil, efektif, dan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat praktik tata kelola pemerintahan desa yang baik.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas; Bantuan Sosial; Budaya Politik; Partisipasi Masyarakat; Tata Kelola Partisipatif.

## **1. LATAR BELAKANG**

Program bantuan sosial merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah. Kehadiran program bantuan sosial menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan, menjaga stabilitas sosial, serta membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Berbagai bentuk bantuan sosial seperti bantuan pangan, bantuan langsung tunai, maupun bantuan bersyarat disalurkan kepada masyarakat melalui mekanisme tertentu yang diatur oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, keberhasilan program bantuan sosial tidak hanya ditentukan oleh ketepatan kebijakan yang dibuat, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial politik masyarakat sebagai penerima manfaat.

Budaya politik masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan publik, termasuk program bantuan sosial. Budaya politik dapat dipahami sebagai pola orientasi masyarakat terhadap sistem politik yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, serta keterlibatan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Orientasi tersebut memengaruhi bagaimana masyarakat memahami program pemerintah, merespons kebijakan yang dijalankan, serta berpartisipasi dalam proses pelaksanaannya. Dalam konteks bantuan sosial, budaya politik masyarakat dapat tercermin dari tingkat pemahaman warga mengenai mekanisme bantuan, kepercayaan terhadap aparat pemerintah, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan program bantuan sosial.

Pelaksanaan program bantuan sosial di berbagai daerah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaksesuaian data penerima manfaat, keterlambatan penyaluran bantuan, kurangnya transparansi informasi, hingga munculnya persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif birokrasi, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dan respons masyarakat terhadap program yang dijalankan pemerintah. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme bantuan sosial sering kali menyebabkan munculnya kesalahpahaman mengenai kriteria penerima manfaat, sementara rendahnya kepercayaan terhadap aparat pemerintah dapat memunculkan konflik sosial dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelaksanaan program.

Kelurahan Rantau Indah, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu wilayah yang secara aktif melaksanakan berbagai program bantuan sosial pemerintah. Sebagian besar masyarakat di wilayah ini bekerja pada sektor pertanian, perikanan, buruh harian, dan pekerjaan informal lainnya yang memiliki tingkat kerentanan ekonomi relatif tinggi. Kondisi tersebut menjadikan bantuan sosial sebagai salah satu instrumen penting dalam

membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Di sisi lain, pelaksanaan program bantuan sosial di tingkat kelurahan juga melibatkan interaksi antara masyarakat, aparat kelurahan, serta perangkat lingkungan seperti RT dan RW dalam proses pendataan, verifikasi, dan penyampaian informasi program.

Dalam implementasi bantuan sosial di Kelurahan Rantau Indah, budaya politik masyarakat menunjukkan dinamika yang menarik untuk dikaji. Tingkat pengetahuan masyarakat mengenai mekanisme program bantuan sosial, persepsi terhadap keadilan penyaluran bantuan, serta keterlibatan masyarakat dalam musyawarah dan pengawasan distribusi bantuan menjadi aspek penting yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Karakter budaya politik masyarakat yang terbentuk melalui orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif pada akhirnya menentukan sejauh mana masyarakat mampu mendukung keberhasilan implementasi kebijakan bantuan sosial di tingkat lokal.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis budaya politik masyarakat dalam mendukung implementasi program bantuan sosial di Kelurahan Rantau Indah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana karakter budaya politik masyarakat berperan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program bantuan sosial, sekaligus memberikan gambaran mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan perlindungan sosial di tingkat daerah.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Budaya Politik**

Budaya politik merupakan orientasi masyarakat terhadap sistem politik yang memengaruhi sikap, perilaku, serta partisipasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Menurut Gabriel Almond dan Sidney Verba, budaya politik mencakup orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif. Orientasi kognitif berkaitan dengan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, orientasi afektif berkaitan dengan sikap dan kepercayaan masyarakat, sedangkan orientasi evaluatif berkaitan dengan penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan. Dalam penelitian ini, budaya politik digunakan untuk melihat bagaimana masyarakat memahami, merespons, dan mendukung implementasi program bantuan sosial.

## **Implementasi Program Bantuan Sosial**

Program bantuan sosial merupakan bentuk kebijakan pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan ekonomi. Pelaksanaan bantuan sosial dilakukan melalui tahapan pendataan, verifikasi, validasi, penetapan penerima, dan penyaluran bantuan kepada masyarakat. Pemerintah kelurahan memiliki peran dalam membantu proses administrasi, penyampaian informasi, serta memfasilitasi masyarakat dalam pelaksanaan program bantuan sosial.

## **Hubungan Budaya Politik dan Implementasi Bantuan Sosial**

Budaya politik masyarakat memiliki pengaruh terhadap keberhasilan implementasi bantuan sosial. Tingkat pemahaman masyarakat mengenai program bantuan, kepercayaan terhadap pemerintah, serta partisipasi dalam pengawasan menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas program. Masyarakat yang memiliki budaya politik partisipatif cenderung lebih aktif dalam mendukung pelaksanaan bantuan sosial sehingga proses implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif.

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis budaya politik masyarakat dalam mendukung implementasi program bantuan sosial di Kelurahan Rantau Indah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penelitian dilakukan di Kelurahan Rantau Indah, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai lokasi pelaksanaan program bantuan sosial.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari aparat kelurahan, ketua RT/RW, serta masyarakat penerima bantuan sosial. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memahami budaya politik masyarakat dalam mendukung implementasi program bantuan sosial.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Budaya Politik Masyarakat dalam Mendukung Implementasi Program Bantuan Sosial di Kelurahan Rantau Indah**

Budaya politik masyarakat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi program bantuan sosial di tingkat lokal. Dalam konteks Kelurahan Rantau Indah, budaya politik masyarakat dapat dipahami melalui bagaimana masyarakat memahami program bantuan sosial, membangun sikap terhadap pemerintah, serta berpartisipasi dalam mendukung

pelaksanaan kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, budaya politik masyarakat di Kelurahan Rantau Indah menunjukkan karakter yang relatif partisipatif, meskipun masih ditemukan sejumlah kendala dalam pelaksanaan bantuan sosial. Hal tersebut terlihat melalui orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif masyarakat terhadap implementasi program bantuan sosial.

### **Orientasi Kognitif Masyarakat terhadap Program Bantuan Sosial**

Orientasi kognitif berkaitan dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, termasuk mekanisme bantuan sosial yang diterima masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Kelurahan Rantau Indah pada umumnya telah mengetahui keberadaan program bantuan sosial yang disalurkan pemerintah, baik dalam bentuk bantuan tunai maupun bantuan pangan. Informasi mengenai program bantuan sosial umumnya diperoleh masyarakat melalui aparat kelurahan, RT/RW, serta komunikasi antarmasyarakat.

Pemahaman masyarakat terhadap bantuan sosial terlihat dari pengetahuan mengenai jadwal pencairan bantuan, prosedur pengambilan bantuan, hingga mekanisme pendataan penerima manfaat. Masyarakat menyadari bahwa penetapan penerima bantuan dilakukan melalui proses pendataan dan verifikasi yang melibatkan aparat lingkungan. Dalam praktiknya, RT dan RW menjadi pihak yang paling dekat dengan masyarakat dalam menyampaikan informasi mengenai perubahan data penerima bantuan maupun persyaratan administrasi yang dibutuhkan.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat belum sepenuhnya merata. Sebagian masyarakat masih mengalami keterbatasan informasi mengenai indikator penerima bantuan sosial, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi terkait masyarakat yang dianggap layak menerima bantuan. Kondisi tersebut terkadang memunculkan anggapan ketidaktepatan sasaran bantuan di tengah masyarakat. Situasi ini menunjukkan bahwa orientasi kognitif masyarakat terhadap bantuan sosial masih membutuhkan penguatan melalui peningkatan sosialisasi dan transparansi informasi dari pemerintah kelurahan.

Dalam perspektif budaya politik, pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintah menjadi faktor penting dalam membangun dukungan sosial terhadap implementasi program. Semakin tinggi tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme bantuan sosial, maka semakin besar pula peluang terciptanya partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap keberhasilan program bantuan sosial.

### **Orientasi Afektif Masyarakat terhadap Implementasi Bantuan Sosial**

Orientasi afektif berkaitan dengan sikap emosional, tingkat kepercayaan, serta persepsi masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan bantuan sosial. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Kelurahan Rantau Indah secara umum menunjukkan sikap yang cukup positif terhadap pemerintah kelurahan dalam mendukung pelaksanaan bantuan sosial. Aparat kelurahan dinilai memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memperoleh informasi mengenai jadwal penyaluran bantuan, membantu pengurusan administrasi, serta memfasilitasi penyampaian keluhan masyarakat terkait bantuan sosial.

Kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah menjadi faktor penting dalam menciptakan kelancaran implementasi bantuan sosial. Ketika masyarakat memiliki keyakinan bahwa pemerintah menjalankan program secara adil dan transparan, maka masyarakat cenderung lebih kooperatif terhadap kebijakan yang dijalankan. Dalam penelitian ini, sebagian besar masyarakat menunjukkan penerimaan yang baik terhadap program bantuan sosial karena dinilai membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga, khususnya bagi masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi rentan.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang merasa kurang puas terhadap proses distribusi bantuan sosial. Persepsi tersebut muncul akibat adanya penilaian bahwa beberapa masyarakat yang dianggap layak menerima bantuan justru tidak masuk dalam daftar penerima manfaat, sementara terdapat masyarakat lain yang dianggap lebih mampu tetap memperoleh bantuan. Perbedaan persepsi ini menunjukkan bahwa orientasi afektif masyarakat tidak sepenuhnya bersifat homogen, melainkan dipengaruhi oleh pengalaman dan kondisi sosial ekonomi masyarakat masing-masing.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat dipengaruhi oleh aspek transparansi dan kejelasan informasi. Oleh karena itu, pemerintah kelurahan perlu terus membangun komunikasi yang terbuka dengan masyarakat agar potensi konflik sosial akibat persepsi ketidakadilan dapat diminimalkan.

### **Orientasi Evaluatif Masyarakat dalam Mendukung Implementasi Bantuan Sosial**

Orientasi evaluatif berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap kebijakan yang dijalankan pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Kelurahan Rantau Indah menunjukkan keterlibatan dalam memberikan penilaian terhadap implementasi program bantuan sosial melalui penyampaian masukan, keberatan, maupun pengaduan terkait penerima bantuan sosial. Masyarakat umumnya menyampaikan

berbagai aspirasi melalui RT/RW maupun langsung kepada aparat kelurahan apabila ditemukan ketidaksesuaian data penerima manfaat.

Partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi menunjukkan adanya budaya politik partisipatif di tingkat lokal. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan secara pasif, tetapi juga turut terlibat dalam mengawasi proses pelaksanaan bantuan sosial. Kehadiran masyarakat dalam musyawarah lingkungan maupun penyampaian informasi mengenai kondisi ekonomi warga menjadi bentuk keterlibatan masyarakat dalam mendukung ketepatan sasaran bantuan sosial.

Namun demikian, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan bantuan sosial masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan pemahaman terhadap prosedur administrasi dan kurangnya akses informasi mengenai mekanisme evaluasi program. Dalam beberapa kondisi, masyarakat masih cenderung menyerahkan sepenuhnya proses penentuan penerima bantuan kepada pemerintah kelurahan tanpa keterlibatan aktif dalam pengawasan.

Meskipun demikian, secara umum budaya politik masyarakat di Kelurahan Rantau Indah menunjukkan kecenderungan yang mendukung implementasi program bantuan sosial. Adanya pemahaman masyarakat terhadap program, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan menunjukkan bahwa budaya politik masyarakat memiliki kontribusi penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan bantuan sosial di tingkat kelurahan.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, budaya politik masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung implementasi program bantuan sosial di Kelurahan Rantau Indah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hal ini dapat dilihat melalui orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif masyarakat terhadap pelaksanaan bantuan sosial. Pada aspek orientasi kognitif, masyarakat pada umumnya telah memiliki pemahaman mengenai keberadaan program bantuan sosial, meskipun masih terdapat keterbatasan informasi terkait mekanisme pendataan dan penetapan penerima manfaat. Pada aspek orientasi afektif, masyarakat menunjukkan tingkat kepercayaan yang cukup baik terhadap aparat kelurahan dalam membantu proses implementasi bantuan sosial, walaupun masih terdapat persepsi ketidakadilan dalam penyaluran bantuan di sebagian masyarakat. Sementara itu, pada aspek orientasi evaluatif, masyarakat menunjukkan keterlibatan dalam memberikan masukan, pengawasan, dan penilaian terhadap pelaksanaan bantuan sosial di lingkungan kelurahan.

Secara umum, budaya politik masyarakat di Kelurahan Rantau Indah menunjukkan kecenderungan yang partisipatif dalam mendukung implementasi program bantuan sosial. Tingkat pemahaman masyarakat, kepercayaan terhadap pemerintah, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan menjadi faktor yang membantu kelancaran pelaksanaan bantuan sosial di tingkat lokal. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi bantuan sosial tidak hanya ditentukan oleh pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan dan partisipasi masyarakat sebagai penerima manfaat.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah kelurahan diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi dan transparansi informasi mengenai mekanisme bantuan sosial, khususnya terkait kriteria penerima manfaat dan proses pendataan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap program bantuan sosial. Selain itu, diperlukan peningkatan komunikasi antara aparat kelurahan dan masyarakat untuk meminimalkan persepsi ketidakadilan dalam penyaluran bantuan sosial.

Masyarakat juga diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan dalam proses pengawasan dan evaluasi pelaksanaan bantuan sosial melalui penyampaian aspirasi maupun partisipasi dalam musyawarah lingkungan. Dengan adanya hubungan yang baik antara masyarakat dan pemerintah kelurahan, implementasi program bantuan sosial diharapkan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Alfabeta.
- Almond, G. A., & Verba, S. (1980). *The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations*. Princeton University Press.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam angka 2024*. Badan Pusat Statistik.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Pustaka Pelajar.
- Hidayat, T. (2021). Implementasi program bantuan sosial bagi masyarakat miskin di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(3), 201–214.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2022). *Pedoman verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023). *Pedoman pelaksanaan program bantuan sosial*. Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Mas'ood, M., & MacAndrews, C. (2008). *Perbandingan sistem politik*. Gadjah Mada University Press.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

- Nugroho, R. (2018). *Public policy: Dinamika kebijakan publik, analisis kebijakan, dan manajemen politik kebijakan publik*. PT Elex Media Komputindo.
- Rahmawati, N., & Putra, A. (2023). Budaya politik masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik di tingkat lokal. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 8(1), 45–59.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Suharto, E. (2017). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*. PT Refika Aditama.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Yuliana, R., & Sari, D. (2022). Partisipasi masyarakat dalam implementasi program bantuan sosial di tingkat desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(4). <https://doi.org/10.31258/jkp.v13i4.8158>